PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK “MIE SETAN” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014

Siti Nur Faiza

Mojokerto

faizahhafidzah@gmail.com

Abstract: This study discusses the rejection of the halal label certification on devil noodle products in the perspective of Islamic law and Law no. 33 of 2014. The results of the study concluded that the rejection of the halal label certification application based on SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 and MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas because the name of Satan is identic with the name of the enemy of Allah and it is feared that it can distance from remembering Allah and can be categorized as '*urf fasid* (bad costome) that must be abandoned. Then, regarding the product name in Law no. 33 of 2014 is not an object that will be examined by halal auditors, but regarding the name and type of product, it is an initial file at the stage of submitting an application, then in article 33 of Law no. 33 of 2014 explains that the determination of product halalness is carried out by MUI in the MUI halal fatwa trial. In line with the conclusion above, the owner of the Surabaya devil noodle product must follow the procedure of LP POM MUI JATIM, namely changing the name of the devil with a good name, then for consumers who consume devil noodle, it is expected that the spicy level is adjusted to the body's ability and not excessive, and for LP POM MUI JATIM to be careful in accepting or rejecting the submission of MUI halal label certification, so that no party feels aggrieved or disappointed.

Keywords: *Mie Setan, MUI halal label.*

Abstrak: Penelitian ini membahas penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penolakan pengajuan sertifikasi Halal MUI berdasarkan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal dikarenakan nama setan termasuk nama musuhnya Allah dan dikhawatirkan dapat menjauhkan dalam mengingat Allah dan dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid* yang harus ditinggalkan. Kemudian mengenai nama produk dalam UU No. 33 Tahun 2014 tidak menjadi objek yang akan diteliti oleh auditor halal, akan tetapi mengenai nama dan jenis produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan, kemudian dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak mie setan Surabaya harus

maliyah

Jurnal Hukum Bisnis Islam

Volume 11, Nomor 02, Desember 2021

p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351

mengikuti prosedur LP POM MUI JATIM yaitu mengganti nama setan dengan nama yang baik, kemudian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan mie setan diharapkan dalam memilih level pedas disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan tidak berlebihan, dan bagi LP POM MUI JATIM agar berhati-hati dalam menerima atau menolak terhadap pengajuan Sertifikasi label halal MUI, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan.

Kata Kunci: *Mie Setan, label halal MUI.*

Pendahuluan

Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan, di beberapa daerah di Indonesia memiliki makanan kuliner yang dijadikan ciri khas daerah tersebut, seperti soto Lamongan, sate Madura, bakso Malang, dan lain-lain. Dalam perkembangan dunia bisnis, banyak pengusaha mencari ide baru agar produk yang ditawarkan menarik, seperti bentuk kemasan yang unik maupun menggunakan nama-nama unik dan menarik, seperti rawon setan, mie setan, cak cuk, ceker setan, dan lain-lain. Bisnis kuliner yang berlabel setan kini menjadi salah satu kuliner yang populer di kalangan pencinta pedas, kata-kata setan yang digunakan oleh produsen bertujuan untuk memberi kesan unik dan arti pedas pada makanan tersebut.

Dalam agama Islam, Allah selalu memerintahkan kita untuk makan dan minuman yang halal, sehingga kita harus menjaga dan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetik. Mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya membahayakan secara fisik akan tetapi akan membahayakan ukhrawi karena yang kita makan akan menjadi daging dan mempengaruhi pola kehidupan kita ke depannya.¹ Adapun tujuan menghindari makanan dan minuman yang haram adalah menjaga akal (*hif' aql*) dalam tingkat daruriyat, apabila tidak diperhatikan akan berakibat rusaknya akal.² Dalam agama Islam menganjurkan untuk

¹ KH. Ma'ruf Amin and dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011). 916.

² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). 228.

mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, seperti dalam firman Allah Q.S. Al Baqarah 168 dan Q.S. Al-Maidah 88:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S. al-Baqarah: 168)³

Dalam firman tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Akan tetapi dewasa ini ada industri makanan maupun bisnis kuliner yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan, maupun pengelolannya tidak sesuai syariat Islam dengan menggunakan campuran bahan kimia berbahaya ataupun bahan yang diharamkan dalam Islam, contohnya sate bekicot yang diharamkan karena menjijikkan dan hidup di dua alam, kemudian penggunaan bahan tambahan yang sudah busuk maupun menggunakan bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan makanan (borax atau formalin).

Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dan informasi mengenai produk-produk yang dikonsumsi merupakan produk halal. MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LP-POM dan komisi fatwa berusaha untuk memberikan jaminan makanan halal melalui sertifikasi halal, akan tetapi pemberian sertifikasi halal bersifat suka rela terhadap produk yang memang mendaftarkan produknya untuk diteliti kehalalannya hingga komisi fatwa memberikan sertifikasi halal dan memberikan label halal MUI pada produk makanan tersebut.⁴

Memeriksa kehalalan produk merupakan tugas dari auditor halal, pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tugas auditor halal tidak menerangkan untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk, kemudian dalam pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 nama dan

³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002). 46

⁴ Ma'ruf Amin and dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975*. 916

jenis produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan.

Dalam surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara lain:

1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak.
4. Nama Produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie goreng Xi Fa Cai.
5. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan atau porno

Dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, yaitu Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi ('urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.

Semakin tingginya minat masyarakat pada kuliner mie setan, banyak konsumen yang menanyakan kehalalan kuliner ini, kemudian pada tahun 2016 investor mie setan Semolowaru yaitu Runiar memiliki iktikad baik untuk mendaftarkan kuliner mie setan ke MUI Surabaya, karena menurutnya melalui sertifikasi label halal MUI akan memberikan kekuatan hukum bahwa mie setan adalah halal. Kemudian, sebelum Runiar mengajukan sertifikasi halal MUI terlebih dahulu Runiar bertanya langsung ke kantor MUI Surabaya mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi label halal MUI, akan tetapi usahanya untuk mengajukan sertifikasi label halal MUI pada

produk mie setan harus berhenti pada tahap ini dikarenakan MUI Surabaya tidak dapat memproses lebih lanjut pengajuan produk bernama setan, pengajuan sertifikasi label halal MUI dapat dilanjutkan dengan syarat mengganti nama setan dengan nama lain yang tidak mengandung nama alam ghaib, seperti setan, akhirat, surga, neraka, dan nama-nama lainnya yang dilarang oleh MUI dalam sertifikasi label halal MUI.⁵ Sesuai dengan surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi.

Konsep Umum ‘Urf

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (Ahli Fikih Uneversitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum daripada ‘urf. Menurutnya suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu dalam menetapkan keperluan rumah tangga yang diambil dari mahar yang diberikan suami.⁶

Ulama ushul fikih membedakan antara ‘urf dan adat, adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional, perbuatan tersebut berkaitan dengan perbuatan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan maupun perbuatan orang banyak yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk.⁷ ‘urf bisa diartikan sebagai “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.⁸

⁵ Runiar, “Wawancara,” 11 Desember, 2018.

⁶ Addul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). 1877.

⁷ Ibid.

⁸ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 2009. 334

Adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, akan tetapi kebiasaan yang benar-benar dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan.

Dasar Hukum 'Urf

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum Islam dengan beberapa dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al- A'raf: 199).⁹

Melalui surat Al-A'raf ayat 199, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, para ulama fiqh mengartikan ma'ruf sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar.¹⁰ Kemudian dalam ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mass'ud:

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (HR. Imam Ahmad)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Kemudian, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 6, sebagaimana berikut ini:

⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*.323

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010). 212

¹¹ Ibid. 212-213.

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S al-Maidah: 6)¹²

Macam-Macam ‘urf (Kebiasaan)

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ al-‘urf dibagi menjadi dua, yaitu al-‘urf sahih dan al-‘urf fasid. Al-‘urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan nash (ayat al-Qur’ān atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa muḍarat kepada mereka,¹³ tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁴ Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat ketika istri belum menerima maharnya secara penuh maka belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya dan pemberian lelaki kepada calon istri ketika peminangan dianggap sebagai hadiah bukan mahar.¹⁵

Al-‘urf fāsīd adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Misalnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, kebiasaan tersebut tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.¹⁶ Al-‘urf fāsīd tidak boleh dipelihara karena pemeliharaan adat jenis ini akan mengakibatkan rusaknya fondasi hukum-hukum syariat.¹⁷

Keabsahan ‘urf Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fāsīd (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil

¹² RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah Indonesia*. 195

¹³ Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. 339

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, n.d.). 89

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005). 154

¹⁶ Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. 337

¹⁷ Imdad Robbani, *Formulasi Nalar Fiqh*, 2014. 293

penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihād fī ma la naṣṣa fih, menyatakan bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah kemudian kalangan Malikiyah selanjutnya kalangan Hanabilah dan kalangan syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun terdapat perbedaan rinciannya antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan kedalam dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.¹⁸

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' jika memenuhi syarat berikut ini:

1. 'urf baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum.
2. 'urf akan dijadikan sandaran hukum yang lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. 'urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. 'urf tidak bertentangan dengan nash, maksudnya tidak ada ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an dan Sunnah.
5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
6. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁹

Makanan Halal dan Haram

Menurut bahasa halal berasal dari kata **حلال** yang berarti sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Menurut Abu Muhammad al-Husayn Ibn Mas'ud al- Baghawi (436-510 H)

¹⁸ Efendi, *Ushul Fiqh*. 155

¹⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005). 89.

dari mazhab Syafi'i kata halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat karena baik.²⁰ Halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang menurut ajaran Islam. Menurut Yusuf Qardhawi pada asalnya hukum dari sesuatu adalah boleh dan tidak haram, sebagaimana maksud yang terkandung kaidah fikih:

“Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh).”

Dalam kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu pada asalnya hukumnya boleh dan tidak haram, kecuali ada dalil nash sah (benar) dan jarih (jelas) yang menunjukkan atas keharamannya, apabila tidak ada dalil nash dalam penunjukkan keharamannya maka kembali pada hukum asalnya yaitu halal.²¹ Para ulama dalam menentukan prinsip segala sesuatu asalnya boleh merujuk pada firman Allah, yaitu:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS: Al-Baqaraah 29).²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi adalah nikmat, Allah hanya mengharamkan sesuatu pada beberapa saja, dan pastinya ada hikmah-hikmah tertentu yang tersembunyi demi kebaikan manusia, sedangkan wilayah kehalalan sangatlah luas.²³

Allah memerintahkan hendaklah memakan makanan yang halal dan baik dan janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-

²⁰ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam* XVI, no. 2 (2016). 292

²¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani* (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003). 94-95.

²² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*. 8

²³ Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. 96

batas makanan yang dihalalkan.²⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al- A'raaf: 31, sebagaimana berikut ini:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S al- A'raaf: 31).²⁵

Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedepankan konsep halal namun juga baik (ṭayyib), menurut syara' makanan yang baik (ath-ṭa'ām ath- ṭayyib) berarti sesuatu yang boleh dimakan, baik dari sisi zat, ukuran, maupun tempat, Hijazi mengartikan kata ṭayyibat sebagai sesuatu yang suci dari shubhah.²⁶

Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014

Pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Mengenai proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Mengenai jaminan produk halal yang disingkat JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (5). Adapun tujuan adalah Jaminan Produk Halal antara lain:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu,” in *Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 153

²⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*. 281

²⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011). 144

2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁷

Dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk, kemudian pada pasal 15 menjelaskan bahwa tugas auditor halal, antara lain: (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki kewajiban, yaitu: (a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (c) memiliki penyelia halal; (d) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁸ Kemudian, tata cara memperoleh sertifikat halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 29 mengatur pengajuan permohonan, antara lain:

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH
2. permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen: (1) data pelaku usaha; (2) nama dan jenis produk; (3) daftar produk dan bahan yang digunakan; (4) proses pengolahan produk
3. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.

²⁷ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, n.d. Pasal 3.

²⁸ Ibid. Pasal 24

Mengenai penetapan kehalalan produk diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 33 menetapkan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI yang dilakukan dalam sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementrian/ lembaga, dan/ atau instansi terkait.

Landasan Hukum Penolakan Sertifikasi Label Halal Mui Surabaya Terhadap Produk Mie Setan

Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie Setan Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI ditolak sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama produk yang bernama setan, menurut staff LP POM MUI nama produk yang bernama setan harus diganti nama terlebih dahulu, bila tidak dirubah maka LP POM MUI tidak akan menerima pengajuan sertifikasi halal pada produk mie setan. Penolakan pengajuan sertifikasi label halal pada produk mie setan sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, pada poin ketiga menetapkan bahwa nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. Akan tetapi, dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, yaitu: Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi ('urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.²⁹

Menurut kepala LP POM MUI JATIM, Bapak Sugijanto nama makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama-nama musuhnya Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik dan lain- lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu

²⁹ *Surat Keputusan Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14, n.d.*

dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh LP POM MUI JATIM. Menurut Sugijanto maksud dari 'urf yang dapat disertifikasi halal yang terdapat dalam keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 adalah 'urf yang sudah turun menurun dan dikenal secara umum bahwa makanan tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal dan tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah.

Penamaan nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao mendapat izin sertifikasi halal MUI karena nama tersebut sudah menjadi 'urf dan tidak mengandung makna lain dalam mengartikan makna tersebut. Bir pletok meskipun namanya bir yang terkesan minuman yang memabukkan akan tetapi ada kecuali pada minuman ini, Bir pletok merupakan minuman jahe yang menghangatkan dan ini merupakan tradisi orang betawi yang sudah turun menurun.

Kemudian, nama bir zero alkohol tidak dapat disertifikasi label halal MUI meskipun arti bir zero alkohol adalah minuman tanpa alkohol, hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Kemudian nama bakso, bakpia, bakpau yang berasal dari nama Bak Bak yang berasal dari sebutan Babi dapat disertifikasi halal MUI karena nama bakso sudah menjadi tradisi dan sudah dikenal oleh masyarakat umum kalau bakso adalah makanan yang terbuat dari daging sapi dan dicampur mie, kemudian Bakpia, Bakpao merupakan makanan yang dikenal oleh umum dan tidak ada yang mengartikan dengan makna lain.

Kemudian menurut Sugijanto mengenai nama makanan yang bernama setan seperti rawon setan, mie setan merupakan nama-nama yang jadi musuhnya Allah, maka jangan dijadikan sesuatu yang menyenangkan karena kita sebagai muslim harus berhati-hati, jangan sampai nama-nama yang menjadi musuhnya Allah seperti bakso kafir, mie setan, munafik menjadi idola kita. Apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang

menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan.³⁰ Sebagai seorang hamba Allah maka harus melindungi beberapa hal, antara lain:

1. Melindungi dari Aqidah
2. Melindungi dari pola pikir
3. Melindungi dari makanannya
4. Melindungi dari keturunannya
5. Melindungi dari harga dirinya

Nama bukan hanya pemberian nama, akan tetapi nama akan memberi kesan dan dapat meniru nama-nama tersebut, nama akan memberikan kesan yang mendalam dan akan membekas dalam hati dan akan mempengaruhi pola kehidupan. Dalam pemberian nama LP POM MUI memiliki standart dalam pemberian nama sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah penggunaan nama dan bahan pada point yang kedua menetapkan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakwan, bakpia, dan bakpao.³¹

Semua manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi tayyib (baik) dan jangan mengikuti ajaran setan karena setan adalah musuh yang nyata. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah: 168:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

³⁰ Sugijanto, “Wawancara,” 26 Februari, 2019.

³¹ MUI, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal*, 2003.

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Surah Al- Baqarah: 168).”³²

Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan

Menurut Sugijanto selaku Direktur LP POM MUI JATIM menyatakan memang makanan yang bernama setan akhir-akhir ini terkenal dikalangan masyarakat luas, akan tetapi untuk saat ini LP POM MUI JATIM tidak bisa menerima pengajuan sertifikasi label halal pada produk mie setan. Dan dapat diterima pengajuannya setelah namanya dirubah menjadi nama yang sesuai dengan standart LP POM MUI JATIM, karena kata-kata setan yang terdapat dalam produk mie setan belum termasuk ‘urf.

Dalam catatan keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 tentang nama produk yang tidak dapat disertifikasi berbunyi: „Poin-poin diatas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (‘urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.’ Adapun maksud ‘urf yang terdapat dalam catatan keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 adalah adat kebiasaan (‘urf) yang sudah turun menurun dan dikenal secara umum bahwa makanan tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal dan tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah.

Kemudian bagaimana dengan produk yang bernama setan seperti, mie setan, rawon setan, bakso setan. Di Indonesia kuliner yang berlabel setan sudah terkenal dikalangan masyarakat Indonesia dan terutama dikalangan pecinta pedas, meskipun nama makanan yang bernama setan memang menakutkan dan menyeramkan dan memang terkesan tidak sopan dalam penamaan makanan, akan tetapi nama setan sudah banyak yang tahu hanyalah simbol dari

³² RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah Indonesia*. 46

makanan yang memiliki cita rasa pedas dan tidak ada tujuan untuk mengatakan makanan setan.

Penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama mie setan merupakan nama-nama yang dibenci oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 168:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)”.³³

Menurut Sugijanto maksud dari janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan adalah segala sesuatu ajaran syaitan yang nampak dan tidak nampak, kemudian bila dihubungkan dengan penolakan sertifikasi label halal pada produk mie setan adalah LP POM MUI JATIM menolak pengajuan tersebut agar tidak semakin menyebar makanan yang bernama aneh-aneh tersebut di kalangan masyarakat, karena dikhawatirkan apabila produk bernama setan disertifikasi label halal akan semakin banyak makanan dengan nama sebutan yang menjadi musuhnya Allah, seperti munafik, kafir, dan lain-lain. Dan dikhawatirkan menyebabkan jauh dari mengingat Allah, sehingga menurut LP POM MUI JATIM produk mie setan ternasuk dalam kategori ‘urf fāsid karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

Mie setan merupakan kuliner mie dengan pilihan level pedas yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan selera konsumen. Sehingga konsumen bisa memperkirakan level pedas yang sesuai kemampuannya dan tidak berlebihan sehingga tidak membahayakan kesehatan tubuhnya, apabila tidak bisa memakan makanan pedas lebih baik memilih level angel tanpa cabe. Dalam hadis Nabi Saw. terdapat larangan untuk makan dan minum berlebihan sebagaimana berikut ini:

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak

³³ Ibid. 46

sombong. Sesungguhnya Allah SWT sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya terlihat bekasnya.' (H.R. Ahmad)."

Makanan yang halal dan baik dan janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedepankan kosep halal namun juga baik (tayyib), menurut syara' makanan yang baik (ath-tha'am ath- tayyib) berarti sesuatu yang boleh dimakan, baik dari sisi zat, ukuran, maupun tempat.

Ketika LP POM MUI JATIM menolak pengajuan sertifikasi label halal pada produk Mie setan terkesan makanan ini termasuk makanan yang terlarang sehingga tidak dapat mendapatkan sertifikasi label halal MUI. Dalam Islam penetapan makanan Halal dan Haram sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an adapun kriteria makanan haram sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 173:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (QS. Al-Baqarah : 173).³⁴

Makanan yang diharamkan lidzatihi secara jelas, antara lain bangkai, darah, daging babi, khamr, binatang yang disembelih disebut nama selain Allah, binatang buas yang bertaring, burung bercakar yang memangsa dengan cakarnya seperti elang, binatang yang dilarang dibunuh, binatang yang diperintah untuk dibunuh, keledai rumah, binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya diharamkan, anjing, binatang yang menjijikkan dan kotor, dan semua makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

³⁴ Ibid. 47

Ketika LP POM MUI JATIM menolak pengajuan sertifikasi label halal MUI pada produk mie setan bukan berarti makanan ini termasuk makanan yang tidak halal, hanya saja LP POM MUI JATIM tidak dapat menjamin kehalalan produk mulai dari bahan dan cara pengelolaan, sehingga masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang belum mendapat label halal MUI dan kehalalan makanan tidak harus ada label halal MUI, apabila bahan dan cara pengelolaannya dan cara perolehannya halal maka termasuk makanan halal meskipun belum tercantum label halal MUI, karena adanya sertifikasi label halal MUI menggunakan sistem pengajuan dari perusahaan yang berkepentingan.

Dalam surah at-Taḥrīm ayat 1 Allah melarang Nabi Muhammad untuk mengharamkan yang halal, sebagaimana berikut ini:

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Analisis Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan.

Sistem pendaftaran sertifikasi label halal MUI harus melalui pendaftaran langsung ke LP POM MUI JATIM selaku Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik, dalam hal ini Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie Setan Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI ditolak sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama produk yang bernama setan.

Pada pasal 1 ayat (3) UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi yang menjadi indikator kehalalan produk adalah bahan, cara

pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk dan tidak menjamin kehalalan produk berdasarkan nama produk. kemudian untuk memeriksa kehalalan produk merupakan tugas dari auditor halal, akan tetapi tugas auditor halal pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak menerangkan bahwa auditor halal melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk.

Adapun tugas auditor halal, antara lain: : (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelian; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. Kemudian, tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 melakukan pengajuan permohonan berikut ini:

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH
2. permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data pelaku usaha
 - b. nama dan jenis produk
 - c. daftar produk dan bahan yang digunakan
 - d. proses pengolahan produk

Dalam pengajuan permohonan berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah nama produk, dalam hal meskipun tugas auditor yang terdapat pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak memeriksa atau meneliti nama produk yang didaftarkan, akan nama produk menjadi dokumen permohonan sertifikasi halal yang harus dilengkapi pada tahap pengajuan. Kemudian, mengenai penetapan kehalalan produk dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI

dalam sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga terkait. Dan keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal, jadi penetapan produk halal tetap menjadi kuasa MUI.

Penutup

Dari pemaparan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa Landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama produk yang bernama setan yang tidak sesuai dengan standart LP POM MUI JATIM yang tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga mengenai nama produk yang tidak dapat disertifikasi, salah satunya adalah nama produk yang mengandung nama setan, kemudian tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah penggunaan nama dan atau simbol-simbol yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI, bahwasannya terkenalnya makanan mie setan di berbagai wilayah indonesia dalam pandangan LP POM MUI JATIM belum termasuk kategori 'urf yang diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI karena nama setan termasuk nama yang menjadi musuhnya Allah dan dikhawatirkan dapat menjauhkan dari mengingat Allah. Kemudian, dalam UU No. 33 Tahun 2014 nama produk tidak menjadi objek yang akan diteliti oleh auditor halal, akan tetapi mengenai nama dan jenis produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan, kemudian dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga terkait.

Oleh karena itu Bagi pihak mie setan Surabaya harus mengikuti prosedur LP POM MUI JATIM yaitu mengganti nama setan dengan nama yang baik dan sesuai dengan

standart LP POM MUI JATIM. Bagi konsumen yang mengonsumsi makanan mie setan diharapkan dalam memilih level pedas disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan tidak berlebihan. Serta bagi LP POM MUI JATIM agar berhati-hati dalam menerima atau menolak terhadap pengajuan Sertifikasi label halal MUI, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan.

Daftar Pustaka

- Al-Asyhar, Thobie. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." In *Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam XVI*, no. 2 (2016).
- Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Dahlan, Addul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, n.d.
- Ma'ruf Amin, KH., and dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- MUI. *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal*, 2003.
- RI, Depag. *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Robbani, Imdad. *Formulasi Nalar Fiqh*, 2014.
- Runiar. "Wawancara." 11 Desember, 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugijanto. "Wawancara." 26 Februari, 2019.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat*

Hukum. Jakarta: Amzah, 2011.

Surat Keputusan Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14, n.d.
UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, n.d.